

## **Tarik Ulur Aset Pemerintah Daerah yang Akan Diambil Alih Otorita IKN DPRD Kukar Ingin BUMD Dilibatkan**



*Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Selasa, 23/04/2024*

**Pengelolaan aset Pemerintah Daerah di wilayah Kutai Kartanegara (Kukar) mulai dibahas DPRD. Terutama aset milik Pemerintah Daerah yang masuk dalam delineaasi Ibu Kota Nusantara (IKN).**

**SEBANYAK** enam kecamatan di Kukar telah ditetapkan masuk wilayah ibu kota negara baru. Yakni Kecamatan Samboja, Kecamatan Muara Jawa, Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Loa Kulu, dan Kecamatan Samboja Barat. Keputusan itu membuat aset Pemkab Kukar di wilayah tersebut akan beralih pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah Khusus (Pemdusus) IKN.

Oleh karena itu, perlu kepastian mengenai berbagai aspek. Mulai penataan lahan, pengaturan aset fisik, hingga isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat setempat. Baik Otorita IKN maupun DPRD Kukar, masih mendalami kewenangan terkait pembangunan dan pengelolaan aset di sebagian wilayah Kukar yang masuk wilayah IKN. Hingga saat ini, tanggung jawab terhadap enam kecamatan tersebut masih dipegang oleh Pemkab Kukar.

“Tanggung jawab ini akan terus berlanjut sampai diaktifkannya Pemerintah Daerah Khusus (Pemdusus) IKN. Di mana kemudian akan ada proses penyerahan wewenang,” kata Deputy Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin dalam keterangan tertulisnya setelah menerima kunjungan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kukar di Kantor Otorita IKN, Kompleks Pantai Mentari *Compound* (PMC) Batakan, Balikpapan, Senin (22/4).

Dia menambahkan, berdasarkan pembagian wilayah yang telah diatur, seluruh aset yang ada di dalam delineasi IKN, baik milik Pemprov Kaltim, Pemkab Kukar, maupun Pemkab Penajam Paser Utara (PPU), nantinya menjadi milik Otorita IKN. “Kemudian ada proses penyerahan-penyerahan aset yang sedang berlangsung. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang sedang berjalan. Pemkab Kukar tentunya akan mendukung pembangunan untuk IKN. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang 3/2022 tentang Ibu Kota Negara,” terang Alimuddin.

Menurut mantan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) PPU ini, terdapat beberapa inisiatif yang tengah dipersiapkan jelang pegelolaan penuh kawasan IKN oleh otorita. Di antaranya, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Mulai guru hingga tenaga kerja terampil. Dalam hal pengelolaan aset fisik, DPRD Kukar telah mengusulkan agar aset-aset tersebut dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bersama dengan Otorita IKN.

“Tentunya, kita berharap proses ini (penyerahan aset daerah) segera tuntas supaya kita nanti enak ketika melaksanakan fungsi Pemdassus,” kata Alimuddin. Sementara itu, Ketua Pansus DPRD Kukar Salehuddin mengatakan, koordinasi antara Otorita IKN dan Pemkab Kukar sangat penting. Dia berharap, adanya transparansi informasi terkait kesepakatan kepemilikan wilayah serta kelanjutan aset yang selama ini dikelola pemerintah daerah. (kip/riz/k8)

#### **Sumber berita:**

1. Kaltimpost, Tarik Ulur Aset Pemerintah Daerah yang Akan Diambil Alih Otorita IKN DPRD Kukar Ingin BUMD Dilibatkan, 23/04/24

#### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU 23/2014) diatur sebagai berikut:
  - (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
  - (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh daerah dengan:
    - a. Daerah lain;
    - b. pihak ketiga; dan/atau
    - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kerja sama dengan daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.
2. Dalam Pasal 364 ayat (1) UU 23/2014 diatur bahwa kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (3) merupakan kerja sama antardaerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan:
- a. yang memiliki eksternalitas lintas daerah; dan
  - b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.